

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara



Dinas Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jl. Sei Batuginging No. 6 Medan 20154

Nomor Telepon : (061) 4568819

Website : [Laman dkp.sumutprov.go.id](http://Laman%20dkp.sumutprov.go.id)

E-mail : program.dkpsu@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, Maret 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara

Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM
NIP. 19770826 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
1.4 Dasar Hukum.....	8
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	9
BAB II	11
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III.....	26
3.1 Capaian Kinerja	26
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	27
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	28
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	29
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	31

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	32
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	34
3.2	Realisasi Anggaran	37
BAB IV		43
LAMPIRAN		44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	12
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	17
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	27
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	28
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	29
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	31
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	32
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	33
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	35
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan yang lingkupnya.
- b. Penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap, budidaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan

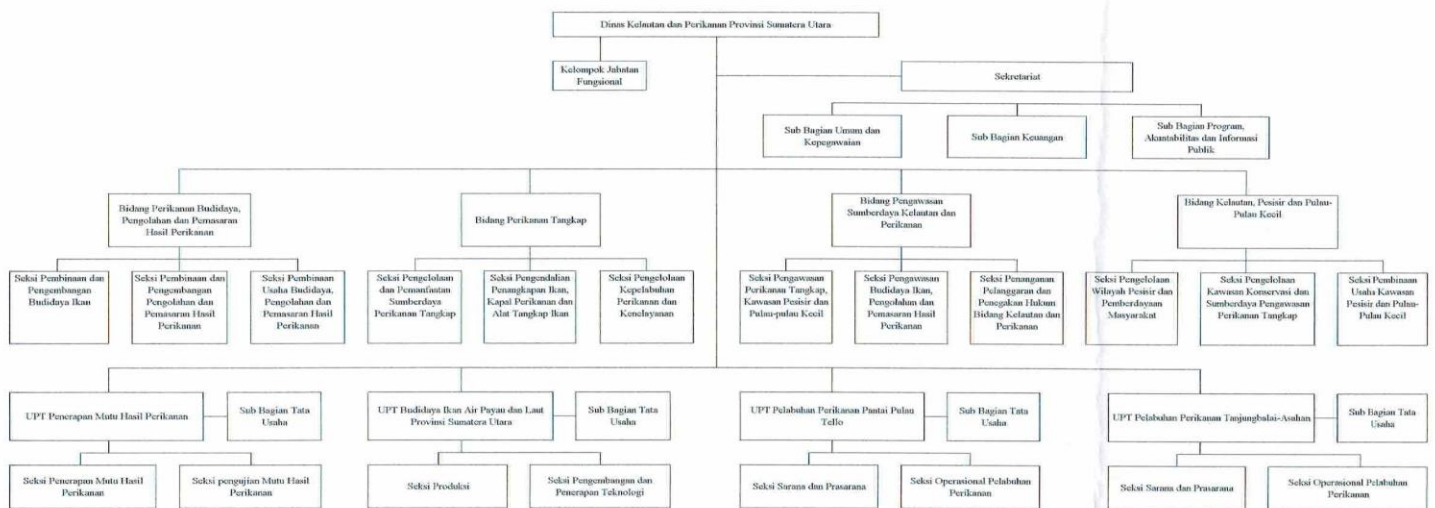
dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan ruang lingkupnya.

- c. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan runag lingkupnya.
- d. Penyelenggaraan Administrasi perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan runag lingkupnya.
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1 (2022)	Rp 56.691.171.139
APBD	Tahun n (2023)	Rp 49.752.011.898

Sumber : LKIP 2022, SIPD 2023

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap;

2. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya;
3. Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
4. Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai zonasi;
5. Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan;
6. Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih;
7. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
8. Degradasi fungsi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
9. Minimnya fasilitas dan infrastruktur di wilayah pantai barat dan timur Sumatera Utara sehingga sumberdaya perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal;
10. Tidak adanya kawasan khusus budidaya perikanan serta belum cukup tertatanya pasar dalam pengembangan perikanan.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif. Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isu strategis tersebut juga dapat menjadi bahan dalam mendesain skenario rencana pembangunan dan rencana

pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan. Sejalan dengan konteks tersebut, di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Utara dikategorikan ke dalam dua aspek yaitu ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Isu Strategis Pembangunan Kelautan dan perikanan
Provinsi Sumatera Utara**

No	ISU – ISU STRATEGIS	PENANGGULANGAN
1	Luasnya wilayah territorial laut Sumut dengan banyaknya pulau memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya laut	- Peningkatan efektifitas dan optimalisasi usaha penangkapan ikan - Peningkatan dan pengembangan usaha budidaya laut
2	Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia	Peningkatan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia pengawasan
3	Masih lemahnya kemampuan teknis pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- Meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis penangkapan ikan, budidaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4	Ketersediaan sumberdaya ikan laut cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran, kerusakan perairan serta penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang terlarang	- Pengkayaan sumberdaya ikan dilaut melalui kegiatan restocking, rumpon, rumah ikan dll - Sosialisasi peaturan perundang-undangan tentang perikanan
5	Produktivitas nelayan masih tergoong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran <5GT sehingga jangkauan operasional terbatas	- Menyelenggarakan bimbingan tekni penangkapan ikan -Bantuan kapal >5 GT dan alat tangkap ikan

No	ISU – ISU STRATEGIS	PENANGGULANGAN
6	Produktiyitas dan daya saing usaha perikanan karena integrasi sistim produksi di hulu dan hilir belum optimal, karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan, kualitas SDM dan kelembagaannya meliputi pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan Informasi belum memadai.	-Menyelenggarakan bimbingan teknis budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan -Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
7	Rendahnya produktivitas perikanan budidaya disebabkan karena keterbatasan induk unggul dan benih bermutu, tingginya harga pakan, keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi, dan pasar, hama dan penyakit ikan, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.	- Memproduksi induk unggul dan benih bermutu - Memproduksi pakan mandiri - Membantu pembudidaya terhadap akses permodalan - Melakukan monitoring dan pengendalian hama dan penyakit ikan
8	Pengembangan dan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SNI dan Internasional. sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing Internasional.	- Melaksanakan monitoring mutu dan bahan-bahan berbahaya pada produk perikanan - Sosialisasi standar mutu hasil perikanan sesuai SNI dan Standar Internasional.
9	Belum optimalnya perlindungan terhadap pelaku dan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.	Melaksanakan asuransi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan

No	ISU – ISU STRATEGIS	PENANGGULANGAN
10	Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan ekosistem seperti abrasi, sedimentasi, pencemaran, dan tindakan <i>destructive fishing</i> sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali	- Monitoring ekosistem wilayah pesisir - Rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir - Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir
11	Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, antara nelayan skala besar dan kala kecil pengusaha pembudidaya, pengembang pariwisata termasuk tumpang tindih kewenangan antar instansi.	Mengawasi jalur penangkapan di wilayah pesisir dan laut Melakukan koordinasi lintas sektoral Sosialisasi Perda Zonasi KP3K
12	Pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, lubuk larangan dan genangan air lainnya) masih belum optimal dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan sebagai sumber pangan masyarakat.	- Melaksanakan restocking di perairan umum - Menumbuh kembangkan organisasi masyarakat pengelola restocking

Sumber : Renstra Dinas KP Provsu tahun 2018-2023

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	6,80	7,20	-	-	-
1		Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	655.242,20	676.399,89	682.628,53	690.820,07	690.109,91
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	446.023,20	459.403,89	456.086,29	461.559,33	467.098,04
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	209.219	216.996,00	226.542,25	229.260,76	232.011,89
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,34	49,79	49,74	50,34	50,94
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103	104	108,28	109,58	110,90
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100	105	101	102	103

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	72.031	102.031	48.000	75.000	78.000

Sumber : Renstra Dinas KP Provsu Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan		Pertumbuhan PDRB pada sub sektor perikanan yang merupakan hasil usaha terkait dengan bidang perikanan dan kelautan	PDRB sub sektor perikanan = (nilai akhir produk perikanan – nilai awal produk perikanan)/nilai awal produk perikanan x 100%	Laporan Statistik Perikanan Tangkap
2	Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	Produksi Perikanan = Jumlah Hasil Perikanan	Laporan Statistik Perikanan Tangkap
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Tangkap = Jumlah Hasil Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Perikanan Tangkap

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Budidaya = Jumlah Hasil Perikanan Budidaya	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	Tingkat Konsumsi Masyarakat Sumatera Utara terhadap Komoditas Ikan yang dikonversi dalam Satuan kg per-kapita pertahun	Tingkat Konsumsi Ikan adalah Penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat (AKI = A+B+C)	Data BPS Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	Perbandingan Indeks harga yang diterima nelayan (lt) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (lb)	NTN = Harga yang diterima nelayan (lt)/ harga yang dibayar nelayan (lb)	Data BPS
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	Perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (lt)	NTPi = Harga yang diterima nelayan (lt)/ harga yang dibayar pembudidaya (lb)	Data BPS

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (lb)		
		Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Hektar (Ha)	Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang adalah upaya memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak menjadi berfungsi kembali	Jumlah kawasan rehabilitasi terumbu karang = terumbu karang awal + terumbu karang baru/ buatan	Pengukuran ke lokasi kawasan rehabilitasi terumbu karang
	Sasaran : Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dan berdaya saing	Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha)	Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan = Luas area konservasi awal + kawasan konservasi baru	Pengukuran ke lokasi kawasan konservasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				lingkungannya secara berkelanjutan		
		Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (M2)	Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang adalah pemulihan ekosistem Terumbu Karang	Jumlah kawasan rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang = rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang awal + rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang baru	Pengukuran ke lokasi kawasan rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang
		Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha)	Rehabilitasi Ekosistem Mangrove adalah pemulihan ekosistem mangrove	Jumlah kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove = rehabilitasi ekosistem mangrove awal + rehabilitasi ekosistem mangrove baru	Pengukuran ke lokasi kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove

Sumber: Renstra Dinas KP Provsu 2018-2023, Indikator Kinerja Utama Dinas KP Provsu

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana

Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen	7,20
	Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Produksi Perikanan	Ton/ Tahun	676.399,89
			-Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	459.403,89
			-Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	216.996,00
			Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kap/ Tahun	49,79
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	104
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	105
		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dan berdaya saing	Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha)	25.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (M2)	102.031
			Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha)	45

Sumber : Renstra, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	676.399,89 (Ton/Tahun)
		-Produksi Perikanan Tangkap	459.403,89 (Ton/Tahun)
		-Produksi Perikanan Budidaya	216.996,00 (Ton/Tahun)
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	49,79

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
			(Kg/ Kap/ Tahun)
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109 %
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105%
		e. Kawasan Koservasi Perairan	165.000 Hektar
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031 Meter ²
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	50 Hektar

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Birokrasi Perangkat Daerah	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100%
3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100%
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%
6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%
8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Data dan Informasi tentang Kelautan dan Perikanan yang tersedia	100%
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	100%
1.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	100%
1.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	100%
2.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Rekomendasi Izin Perikanan Tangkap atau Pemanfaatan Ruang Laut yang terbit	100%
2.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	100%
2.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	100%
3.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Persentase Pembinaan atau Pengembangan Pembudidaya Ikan atau Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir yang terlaksana	100%
3.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100%
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang tersedia	100%
1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100%
2.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang tersedia	100%
2.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	100%
3.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Rekomendasi Izin Perikanan Tangkap atau Pemanfaatan Ruang Laut yang terbit	100%
3.1	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100%
4.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang tersedia	100%
4.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	100%
4.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	100%
4.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	100%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100%
1.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi tentang Kelautan dan Perikanan yang tersedia	100%
1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	100%
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang tersedia	100%
2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	100%
2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%
2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	100%
2.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	100%
2.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	100%
2.6	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	100%
V.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100%
1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang diawasi	100%
1.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	100%
1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	100%
2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang diawasi	100%
2.1	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100%
2.2	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%
VI.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan hasil perikanan	100%
1.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terlayani	100%
1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	100%
2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang terlaksana	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100%
2.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	100%
3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	100%
3.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%
3.2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	100%

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	676.399,89 (Ton/Thn)	701.341,21	103,69%	Laporan Evaluasi Renja 2023
		- Produksi Perikanan Tangkap	459.403,89 (Ton/Thn)	482.343,21	104,99%	
		- Produksi Perikanan Budidaya	216.996,00 (Ton/Thn)	218.998	100,9%	
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	49,79 (Kg/Kap/Thn)	51,32	103,07%	
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109%	108,36	99,41%	
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105%	97,30	92,67%	
		e. Kawasan Konservasi Perairan	165.000 Ha	166.167,92	101,08%	
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031 M ²	102.031	100%	
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	50 Ha	51	102%	

Sumber : PK dan Laporan Evaluasi Renja Dinas KP Provsu Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Rata-rata capaian indikator kinerja telah memenuhi dan ada beberapa indikator kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	647.654,92	667.517,20	676.399,89	701.341,21	103,69%
		- Produksi Perikanan Tangkap	439.657,60	449.571,7	459.403,89	482.343,21	104,99%
		- Produksi Perikanan Budidaya	227.235,27	217.945,5	216.996,00	218.998	100,9%
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	47,84	49,15	49,79	51,32	103,07%
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,28	107	109	108,36	99,41%
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103,7	105,2	105	97,30	92,67%
		e. Kawasan Konservasi Perairan	-	3.762,07	165.000	166.167,92	101,08%
		h. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	-	72.150	102.031	102.031	100%
		i. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	41	48	51	51	102%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Sumber : RDP Provinsi Sumut 2024-2026, PK Dinas KP Provsu Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap kembali meningkat menjadi sebesar 439.657,60 Ton, dan pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap meningkat kembali menjadi 449.571,7 Ton, begitu pula pada produksi perikanan budidaya dikarenakan adanya pembatasan produksi perikanan di kawasan danau toba sehingga capaian produksi budidaya dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Kemudian untuk angka konsumsi ikan juga mengalami perkembangan hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan karena awal tahun 2020 nelayan tidak melaut selama 4 (empat) bulan dan pembudidaya ikan tidak menjalankan budidaya ikan karena harga pakan yg tinggi, selain itu daya beli masyarakat utk konsumsi ikan juga menurun.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	701.341,21	676.399,89	103,69%
		- Produksi Perikanan Tangkap	482.343,21	459.403,89	104,99%
		- Produksi Perikanan Budidaya	218.998	216.996,00	100,9%
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	51,32	49,79	103,07%
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108,36	109	99,41%
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	97,30	105	92,67%
		e. Kawasan Konservasi Perairan	166.167,92	165.000	101,08%
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031	102.031	100%
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	50	51	102%

Sumber : PK dan Laporan Evaluasi Renja Dinas KP Provsu Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa dari tujuh indikator kinerja untuk realisasi kinerja mengalami peningkatan melebihi dari target akhir Rencana Strategis, sedangkan untuk dua indikator kinerja tidak memenuhi target walaupun telah mencapai tingkat kemajuan pada realisasi nya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	701.341,21	-	-
		- Produksi Perikanan Tangkap	482.343,21	-	-
		- Produksi Perikanan Budidaya	218.998	-	-
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	51,32	-	-
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108,36	-	-
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	97,30	-	-
		e. Kawasan Konservasi Perairan	166.167,92	-	-
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	51	-	-

Sumber : PK dan Laporan Evaluasi Renja Dinas KP Provsu Tahun 2023

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	676.399,89	701.341,21	103,69%	berhasil	-
		- Produksi Perikanan Tangkap	459.403,89	482.343,21	104,99%	berhasil	-
		- Produksi Perikanan Budidaya	216.996,00	218.998	100,9%	berhasil	-
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	49,79	51,32	103,07%	Berhasil	-
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109	108,36	99,41%	berhasil	-
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105	97,30	92,67%	berhasil	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Kawasan Konservasi Perairan	165.000	166.167,92	101,08%	berhasil	-
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031	102.031	100%	berhasil	-
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	50	51	102%	berhasil	-

Sumber : PK dan Laporan Evaluasi Renja Dinas KP Provsu Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat keberhasilan untuk masing-masing indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditentukan sehingga solusi yang diberikan dengan melakukan peningkatan untuk pencapaian realisasi indikator kinerja untuk tahun berikutnya.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	a. Produksi Perikanan	676.399,89	701.341,21	103,69	8.842.933.119	8.778.415.834	99.27	
		- Produksi Perikanan Tangkap	459.403,89	482.343,21	104,99	5.992.368.900	5.947.071.087	99.24	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	- Produksi Perikanan Budidaya	216.996,00	218.998	100,9	2.850.564.219	2.831.344.747	99.32	
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	49,79	51,32	103,07	849.348.000	837.642.000	98.62	
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109	108,36	99,41	444.443.384	438.755.257	98.72	
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105	97,30	92,67	2.378.714.067	2.336.353.364	98.21	
		e. Kawasan Konservasi Perairan	165.000	166.167,92	101,08	207.796.500	172.012.058	82.77	
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031	102.031	100	151.788.000	151.402.000	99.74	
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	51	51	102	143.008.880	141.747.085	99.11	

Sumber : PK, Laporan Evaluasi Renja dan Renja Dinas KP Provsu Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Pencapaian kinerja dengan anggaran yang mendukung sehingga rata-rata indikator kinerja mencapai realisasi diatas target yang ditetapkan, hal ini sangat mendukung dan perlu dilakukan analisa peningkatan yang lebih untuk di tahun berikutnya.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	103,69	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap.	99.27	Menunjang	
		- Produksi Perikanan Tangkap	104,99	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.	99.24	Menunjang	
		- Produksi Perikanan Budidaya	100,9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.	99.32	Menunjang	
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	103,07	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan hasil perikanan. Persentase rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terlayani.	98.62	Menunjang	
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,41	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan	Persentase Fasilitasi akses pasar	98.72	Menunjang	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besaryang terlaksana.			
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	92,67	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Persentase Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besaryang terlaksana.	98.21	Menunjang	
		e. Kawasan Konservasi Perairan	101,08	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan hasil perikanan.	82.77	Menunjang	
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	100	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar	Persentase Data dan Informasi tentang Kelautan dan Perikanan yang tersedia.	99.74	Menunjang	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Minyak dan Gas Bumi				
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	102	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Rekomendasi Izin Perikanan Tangkap atau Pemanfaatan Ruang Laut yang terbit.	99.11	Menunjang	

Sumber : PK, Laporan Evaluasi Renja dan Renja Dinas KP Provsu Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja dan capaiannya tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun 2022, capaian program/kegiatan juga tinggi serta menunjang antara program/kegiatan dalam mencapai indikator kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.131.960.882	2.117.175.210	99.30
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.411.202.601	1.401.594.059	99,32
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.925.631.000	18.205.423.418	96,19
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	311.007.611	316.526.492	101,77
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.869.850	105.759.418	98,96
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	55.380.000	55.086.000	99,47
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	159.920.000	159.918.500	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	53.850.000	53.850.000	100,00
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.500.000	11.250.000	68,18
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.850.625	30.850.625	100,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.979.648	305.171.273	99,09
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.265.490	22.265.490	100,00
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.988.560	117.988.560	100,00
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.974.000	37.974.000	100,00
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.603.000	316.566.786	99,99
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.855.000	31.855.000	100,00
6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	256.014.366	256.014.366	100,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.023.350	62.631.000	94,86

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.130.799.109	1.085.747.576	96,02
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.857.000	31.857.000	100,00
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.901.886.400	3.900.099.616	99,95
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.268.094	181.848.186	98,69
8.2	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100,00
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.250.000	116.250.000	100,00
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	256.026.384	256.026.384	100,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
1.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	207.796.500	172.012.058	82,78
1.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-
1.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	444.443.384	438.755.257	98,72
2.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
2.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	151.788.000	151.402.000	99,75
2.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil			
3.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	143.008.880	141.747.085	99,12
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.014.556.980	1.984.368.000	98,50
1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.224.812.000	1.222.643.500	99,82
2.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
2.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	711.412.000	710.889.676	99,93
3.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3.1	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	163.584.000	163.462.914	99,93
4.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
4.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1.522.176.000	1.522.145.373	100,00
4.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.298.122.617	1.287.323.689	99,17
4.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	743.465.303	741.846.222	99,78
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
1.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	643.173.000	634.588.700	98,67
1.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	849.348.000	837.642.000	98,62
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.378.714.067	2.336.353.364	98,22
2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah	1.005.970.150	995.561.425	98,97

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.239.811.509	1.235.673.932	99,67
2.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	307.663.360	306.885.015	99,75
2.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	67.140.000	66.540.000	99,11
2.6	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	229.979.200	226.684.375	98,57
V.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
1.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	158.797.850	157.691.000	99,30
1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	859.994.876	858.913.609	99,87
1.3	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	245.548.000	240.619.200	97,99
2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.1	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	274.339.250	275.284.500	100,34
2.2	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	87.802.000	86.051.000	98,00
VI.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
1.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan	114.902.150	108.269.000	94,23

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	432.725.160	413.856.461	95,64
2.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	401.066.830	397.326.643	99,07
3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000	-	0,00
3.2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000	-	0,00

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Uraian penjelasan tabel:

Pada realisasi anggaran tahun 2023 rata-rata mencapai persentase yang meningkat walaupun masih ada sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **PEMDA** memiliki **xxx** sasaran strategis dengan **xxx** sasaran strategis tercapai dan **xxx** sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah **... (Diisi hambatan-hambatan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja yang harus dicapai).**

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan 1.
2. Rekomendasi langkah perbaikan 2.

3. Rekomendasi langkah perbaikan x.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Medan, Maret 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara

Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM
NIP. 19770826 200312 1 004

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. ASPAN SOFIAN, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. ASPAN SOFIAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630313 199103 1 006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu.
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1. PRODUKSI PERIKANAN Ton/Tahun	676.399.89
		- Produksi Perikanan Tangkap Ton/Tahun	459.403.89
		- Produksi Perikanan Budidaya Ton/Tahun	216.996
		2. Tingkat Konsumsi Ikan Kg/Kap/Tahun	49,79
2.	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Persen (%)	104
		4. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan Persen (%)	105
		5. Kawasan Konservasi Perairan Hektar (Ha)	25.000
		6. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang Meter Persegi	102.031
		7. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Hektar (Ha)	45

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 1.294.141.904	APBD
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 6.191.445.737	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 7.585.190.124	APBD
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.999.997.311	APBD
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.227.404.636	APBD
TOTAL	Rp. 18.298.179.712	

Medan, 2023

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. ASPAN SOFIAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630313 199103 1 006

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2023 (Jika Ada)**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos., MM
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Pihak Kesatu,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770826 200312 1 004

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	a. Produksi Perikanan	676.399,89 (Ton/Tahun)
		- Produksi Perikanan Tangkap	459.403,89 (Ton/ Tahun)
		- Produksi Perikanan Budidaya	216.996,00 (Ton/Tahun)
		b. Tingkat Konsumsi Ikan	49,79 (Kg/Kap/Tahun)
		c. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109 %
		d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	105 %
		e. Kawasan Konservasi Perairan	165.000 Hektar (Ha)
		f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	102.031 Meter Persegi (M ²)
		g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	50 Hektar (Ha)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 947.036.764	P. APBD
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 7.678.128.900	P. APBD
3. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 6.721.799.286	P. APBD
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.626.481.976	P. APBD
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 950.044.140	P. APBD
TOTAL	Rp. 17.923.491.066	

Medan, 10 November 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770826 200312 1 004

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20222
Telp : (061) 4150461 – 4524309 - Fax (061) 4150194
Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id, Laman inspektorat.sumutprov.go.id/

Medan, 25 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2/2446/ITPROVSU
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi
AKIP pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provsu TAHUN 2022.

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
Di
Medan

Berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, dengan ini disampaikan:

1. Evaluasi dilaksanakan Tim Inspektorat sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/539/INSP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 selama 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal 19 Juni s.d. 05 Juli 2023.
2. Hasil Evaluasi telah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana terlampir.
3. Secara garis besar hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:
 - a. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar **78,40** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dari akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,90.
 - 2) Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,60.
 - 3) Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,50.
 - 4) Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 21,40.
 - b. Renja OPD belum dipublikasikan.

- c. Laporan Kinerja belum memberikan informasi analisis memadai atas perbandingan realisasi kinerja Dinas dengan realisasi kinerja di level nasional.
- d. Memberikan informasi secara lengkap terkait tingkat capaian seluruh indikator kinerja dan hambatannya dalam Dokumen Laporan Kinerja. untuk lebih jelasnya supaya mendalami dan menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi tersebut pada angka 2 sehingga diharapkan peningkatan implementasi SAKIP dari kategori **BB (Sangat Baik)** menjadi kategori **A (Memuaskan)** atau kategori **AA (Sangat Memuaskan)** pada waktu yang akan datang.
4. Laporan Hasil Evaluasi tersebut pada angka 2 dan angka 3 merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia untuk tidak diberikan dan disampaikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan perbaikan agar menjadi kategori A (Memuaskan) atau kategori AA (Sangat Memuaskan).


INSPEKTUR,
LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara.
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara.
3. Sekretaris Daerah Provsu.
4. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu.

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022 (Jika ada).

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2023 (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun 2023